

# KRITIK KONSEP POLIGAMI DALAM DRAFT KHI PERSPEKTIF METODOLOGI SYAHRUR

Tamyiz Muharram \*

## Abstract

*The formulating of polygamy in KHI draft based on the goal of shari'ah. Departing from this, the basic principle of marriage in Islam is monogamy. Shahrur justifies polygamy as stated in Surat an-Nisa' verse 3. This verse according to Shahrur including hududiyah, either hudud al-kamm or hududul kaif. While, according to KHI draft, it is impossible for husband to conduct the justice in term of polygamy, and then Shahrur stated that the verse of polygamy constitutes the theory of limits, either al-had al-adna or al had al-adna. Hence, polygamy permits but not more than 4 wives.*

## I. Pembukaan

Draft KHI (Kompilasi Hukum Islam) atau yang dikenal dengan *Counter Legal* Draft Kompilasi Hukum Islam telah memunculkan pro kontra dimasyarakat. Pro kontra tersebut khususnya dalam masalah yang berkaitan dengan perkawinan.

Pro kontra dalam KHI ini tidak saja berasal dari perbedaan kultur melainkan juga dalam metodologi istimbathnya. Sebagaimana dalam buku draft KHI disebutkan sejumlah pemikir Islam telah menilai beberapa sisi ketidakcocokan fikih-fikih klasik itu, oleh karena ia memang disusun dalam era, kultur, dan imajinasi social yang berbeda-beda. Bahkan disinyalir bahwa fikih klasik tersebut bukan saja tidak relevan dari sudut materialnya, melainkan juga bermasalah dari ranah metodologinya. Hal ini karena KHI tidak disusun sepenuhnya dari realitas empiris keindonesiaan, melainkan

---

\* Penulis adalah dosen tetap Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta.

banyak memindahkan begitu saja apa saja yang ada dalam tafsir-tafsir keagamaan klasik dan kurang memperhatikan kemaslahatan bagi umat Islam Indonesia.

Menurut Penyusun *Counter Legal* Draft KHI, metodologi dan pandangan literalistic akan berdampak negative karena ia akan selalu berusaha menundukkan realitas kedalam kebenaran dogmatic nash, dengan tidak mempertimbangkan realitas kongkret di lapangan. Bahkan ia juga dapat menjadikan Islam menjadi eksklusif dalam tata pergaulan yang multireligius dan multicultural.

Kemudian untuk menghindari kegalauan itu, menurut mereka ada beberapa hal yang dapat dilakukan, di antaranya adalah: *pertama*, mengungkapkan dan merevitalisasi kaidah ushul marginal yang tidak terliput secara memadai dalam sejumlah kitab ushul fiqh.<sup>1</sup> Di samping itu juga ada kaidah-kaidah yang belum difungsikan secara optimal meski kerap sekali muncul dalam kitab-kitab ushul fiqh, seperti: (a) *al-Ibrah bi khushush al-Sabab la bi Umum al-Lafadz*.<sup>2</sup> (b) *Takhssish bi al-'Aql wa Takhshish bi al-'Urf*. (c) *al-Amr idza Dlaqa ittasa'a*.

*Kedua*, andaikata usaha pertama tadi sudah tidak memadai lagi untuk mencari solusi permasalahan-permasalahan kemanusiaan, maka usaha selanjutnya adalah membongkar paradigma ushul fiqh lama. Sebagai contohnya, merubah paradigma teosentrisme ke antroposentrisme, dan memfikihi syari'at atau merelatifkan syari'at.

Dari fondasi paradigmatic tersebut dapat direncanakan beberapa kaidah ushul fiqh alternatif, misalnya: *Pertama*, *al-Ibrah fi al-Maqashid la bi al-Alfadz*, ini bermakna yang menjadi perhatian setiap mujtahid dalam beristimbath dalam al-Qur'an dan al-Sunnah adalah maqashid yang dikandungnya bukan pada aksara atau hurufnya. *Kedua*, *Jawaz Naskh al-Nushush bi al-Maslahah*, hal ini bermakna diperbolehkan menganulir ketentuan-ketentuan ajaran dengan menggunakan logika kemaslahatan. *Ketiga*, *Tanqih al-Nushush bi al-'Aql al-Mujtama'*, kaidah ini bermakna bahwa akal public memiliki kewenangan untuk mengamandemen sejumlah ketentuan dogmatic agama menyangkut perkara-perkara public.<sup>3</sup>

Dari sinilah muncul pro kontra tentang *Counter Legal* Draft KHI karena mengimplementasikan paradigma-paradigma di atas. Salah satu yang menjadi sorotan public adalah poligami. Sebagaimana disebutkan dalam materi Counter Legal Draft KHI Baru (Buku 1 Perkawinan) bagian kesatu pasal 3 ayat 1 yang berbunyi: "Asas perkawinan adalah monogamy".

---

<sup>1</sup>Tim Pangarusutamaan Gender DEPAG RI, *Pembaruan Hukum Islam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: t.p, 2004), hlm. 22.

<sup>2</sup>Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Ushul* (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 225.

<sup>3</sup>Tim Pangarusutamaan Gender DEPAG RI, *Loc.cit.* hlm. 24

Menurut Draft KHI pelaksanaan perkawinan secara poligami adalah batal secara hukum. Hal ini dapat dilihat pada ayat 2 dalam pasal 3, yang berbunyi: "Perkawinan yang dilakukan diluar asas sebagaimana pada ayat (1) dinyatakan batal secara hukum".

Adapun tulisan ini akan membahas kritik metodologi yang digunakan oleh Syahrur tentang poligami terhadap metodologi yang digunakan dalam counter legal draft kompilasi hukum Islam Departemen Agama Republik Indonesia.

## **II. Pemikiran Muhammad Syahrur**

Muhammad Syahrur adalah seorang intelektual muslim kontemporer berkebangsaan Arab Syiria. Ia dilahirkan di Syiria pada tanggal 11 Maret 1938<sup>4</sup>. Syahrur mengawali karier intelektualnya pada pendidikan dasar dan menengah di tanah kelahirannya, tepatnya di lembaga Pendidikan Abdul Rahman al-Kawakibi Damaskus. Pendidikan Dasar ini diselesaikan pada tahun 1957. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, pada bulan Maret 1958 ia dikirim oleh pemerintah ke Uni Soviet untuk menempuh studi Teknik Sipil (*Handasah Madaniyah*) di Moskow. Dan pada tahun 1964 ia meraih gelar sarjana dalam studi tersebut. Disana Syahrur berteman dengan Ja'far dak al-Bab yang nantinya banyak mempengaruhi pemikiran linguistik Syahrur.

Melalui berbagai disiplin ilmu yang ditekuninya inilah Syahrur mencoba menelaah kembali produk pemikir Islam yang menurutnya masih dikonsumsi secara *taken for granted* oleh umatnya. Hal ini sangat terkait dengan anggapan sebagian dari mereka bahwa pemikiran Islam sudah dianggap final dan tidak dapat diperdebatkan lagi<sup>5</sup>. Sementara itu jargon salih} *likulli zaman wa makan* menuntut tafsiran-tafsiran kreatif terhadap al-Kitab ketika bersentuhan dengan sejarah dan berinteraksi dengan generasi yang berbeda.

Ia juga menerangkan ide-idenya di beberapa majalah dan jurnal. Dari beberapa tulisan Syahrur, tampak keberaniannya dalam menawarkan gagasan baru khususnya kajian tentang al-Qur'an dan keislaman pada umumnya. Dapat dilihat bagaimana respon para pemikir kontemporer terhadap buku pertamanya yaitu al-Kitab wa al-Qur'an tersebar di beberapa toko buku dan majalah, disebabkan ide-idenya yang kontroversial<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup>Muhammad Aunul Abied Syah, *Islam Garda Depan*, hlm. 208-209. Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa Al-Qur'an Qira'ah Mu'ashirah*, (Damaskus: Al-Mahalli li At-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 1990), hlm. 46

<sup>5</sup>Amin Abdullah, "Arkoun Dan Kritik Nalar Islam", dalam Tradisi Kemodernan dan Meta-Modernisme (Yogyakarta : LKis, 1996) hlm. 7

<sup>6</sup>Sahiron Syamsuddin, "Review al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'as}irah dalam al-Jami'ah", *Journal of Islamic Studies*, (1998), hlm.. 193-196

## **A. Teori Hudud**

Diantara kandungan-kandungan ajaran yang termuat dalam risalah Muhammad diatas, menurut Syahrur batas-batas ketetapan Allah dalam penetapan hukum (al-Hudud fi at-Tasyri') merupakan yang terpenting diantara yang lain. Karena pada bagian ini merupakan wilayah ketaqwaan tasyri'iyah<sup>7)</sup> yang didalamnya termuat aturan-aturan hukum dari hududullah (batas-batas yang ditetapkan hukumnya oleh Allah).

Pandangan bahwa ayat-ayat hukum itu merupakan hukum itu sendiri yang harus diberlakukan dan merupakan satu-satunya hukum yang ditetapkan Allah, menurut Syahrur adalah keliru, karena syari'at Islam adalah syari'at yang bersifat hududiyah (berada pada batas-batas tertentu) dan bukan syari'at 'ainiyah (syari'at materi)<sup>8)</sup>. Dengan demikian, penetapan suatu hukum tidak harus selalu berada diatas batas-batas yang ditetapkan itu, namun sangat mungkin untuk bergerak diantara batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt., jadi menurut Syahrur langsung direalisasikan. Manusia bisa menetapkan hukum tertentu sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan perkembangan pengetahuan mereka dan tidak harus selalu batasan-batasan itu yang dijadikan hukum.

## **B. Landasan Teori Hudud**

Dalam merumuskan teori hududnya, Syahrur memakai justifikasi al-Qur'an sebagai ide dasarnya, yaitu terdapat pada Q.S. an-Nisa': 13-14.

تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين<sup>9)</sup>

Kedua ayat tersebut memberi pengertian bahwa penetapan batas-batas hukum (hudud) menjadi hak Allah semata, manusia sama sekali tidak berhak didalamnya, sekalipun Nabi Muhammad. Muhammad dalam hal ini bukanlah syari' (pembuat syara') melainkan pelopor ijtihad dalam Islam<sup>10)</sup>. Dan ketentuan bahwa Allahlah yang berhak menetapkan batas-batas hukum, dapat dipahami bahwa damir yang digunakan pada penggalan ayat yaitu damir "hu" bukannya "huma". Jika damir "huma" yang dipakai, maka pelaku yang dimaksud tentunya adalah Allah dan rasul-Nya. Namun secara tekstual jelas menunjukkan pelaku tunggal yaitu Allah saja, bukan untuk pelaku ganda<sup>11)</sup>. Disaat peradaban manusia semakin maju dan kompleks

---

<sup>7)</sup> Muhammad Syahrur, *loc.cit*, hlm. 517

<sup>8)</sup> *Ibid*, hlm. 579

<sup>9)</sup> Q.S. An-Nisa (4) : 13-14

<sup>10)</sup> Muhammad Syahrur, *loc.cit*, hlm. 38

<sup>11)</sup> *Ibid*., hlm. 458

maka pemahaman hududpun akan berubah, tapi semakin sederhana tingkat peradaban manusia, maka pemahaman terhadap hududpun akan sebatas pada pengetahuan manusia<sup>12)</sup>.

### **C. Teori Batas dalam Hudud**

Muhammad Syahrur seperti ditulis dalam biografi singkatnya adalah seorang yang mempunyai keahlian dibidang eksak. Oleh karena itu, sedikit banyak pemikirannya pun dipengaruhi oleh teori-teori ilmu eksaknya, termasuk teori batas (hudud) yang ia rumuskan. Secara teoritis, Syahrur mendasarkan teori batas yang dibangunnya pada analisa matematis yang dikembangkan oleh seorang ahli fisika Isac Newton, khususnya yang berkaitan dengan persamaan fungsi, persamaan fungsi dirumuskan dengan  $y = f(x)$  jika mempunyai satu variabel atau  $y = f(x,2)$  jika mempunyai dua variabel atau lebih.

Menurut Syahrur persamaan fungsi diatas merupakan satu syarat untuk bisa memahami ajaran-ajaran Islam yang mempunyai dua sisi yang saling bertolak belakang tapi merupakan satu kesatuan. Dua sisi tersebut adalah sisi hanifiyah yaitu sisi yang senantiasa dinamis dan elastis serta sisi istiqamah yaitu sisi yang tetap dan lurus (as-Sawabit dan al-Mustaqim).

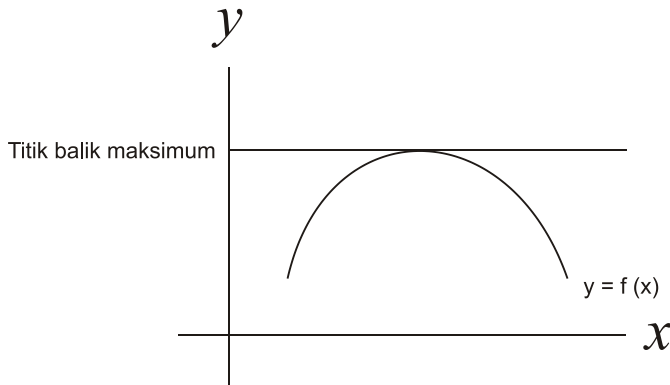
Sebenarnya persamaan fungsi ini mempunyai beragam bentuk yang sangat variatif, namun semuanya dapat disimpulkan menjadi enam bentuk saja, yaitu tiga dalam bentuk persamaan kuadrat, dua dalam bentuk fungsi trigonometri dan satu dalam bentuk fungsi rasional<sup>13)</sup>.

1. Daerah hasil (*range*) dari persamaan fungsi  $y=f(x)$  terbentuk garis lengkung yang menghadap kebawah (kurva tertutup) yang hanya memiliki satu titik balik maksimum yang terletak berhimpit dengan garis lurus yang sejajar dengan sumbu x, posisi seperti ini oleh Syahrur disebut  $H\{a>lat$  al-Hadd al-'Ala (posisi batas maksimal). Adapun gambar persamaan fungsi tersebut adalah :

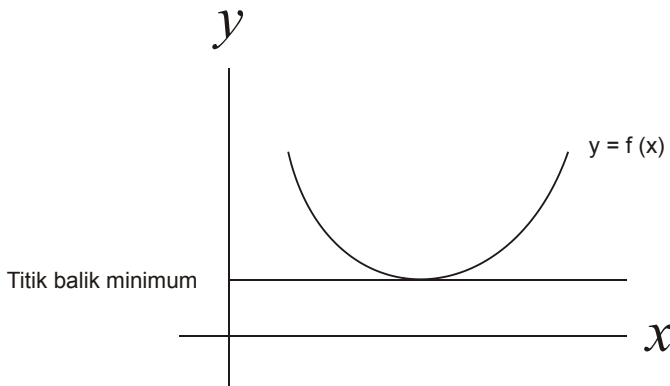
---

<sup>12)</sup>*Ibid.*, hlm. 580

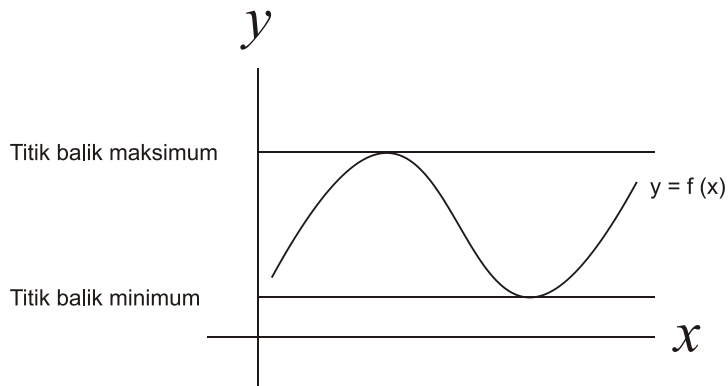
<sup>13)</sup>Variasi dari persamaan fungsi tersebut pada Edwin J. Purcell, *Kalkulus dan Geometri Analitik*, terj Enyoman Susilo dan Bana Kartasasmita Rawuh, (Jakarta : Erlangga, 1984)



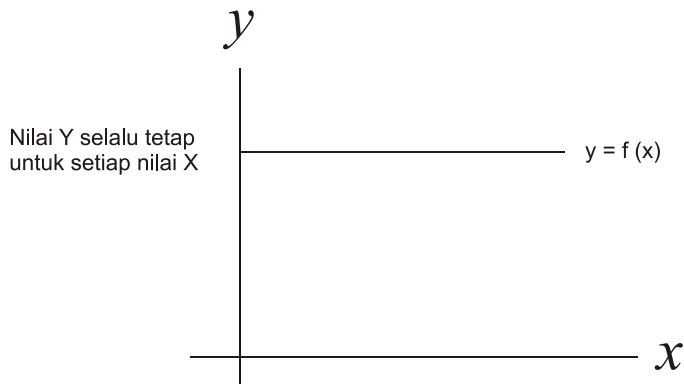
2. Persamaan fungsi yang di daerah hasilnya berbentuk kurva terbuka, ia memiliki satu titik balik minimum yang terletak berhimpit dengan garis lurus sejajar dengan sumbu x, posisi ini disebut dengan H<sup>2</sup>a<sup>2</sup>lat al-Hadd al-Adna<sup>2</sup> (posisi batas minimal) dengan gambar seperti dibawah ini :



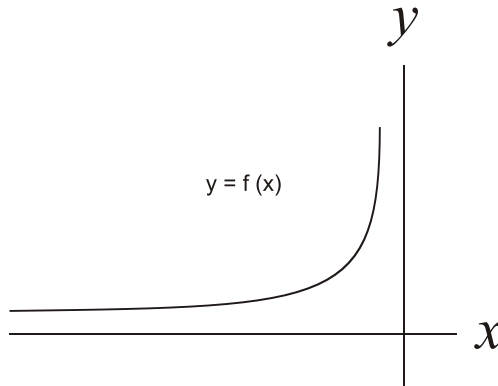
3. Bentuk ketiga yaitu Halat al-Haddaini al-‘Ala wa al-Adna ma’an (posisi batas maksimal dan minimal bersamaan) dengan daerah hasilnya berupa kurva gelombang (gabungan antara kurva tertutup dan terbuka) yang mempunyai sebuah titik balik maksimum dan sebuah titik balik minimum, kedua titik balik tersebut terletak berhimpit pada garis lurus yang sejajar dengan sumbu x. Posisi ini disebut juga dengan fungsi trigonometri yang didasarkan dengan segitiga siku-siku. Gambar dari persamaan fungsi tersebut adalah :



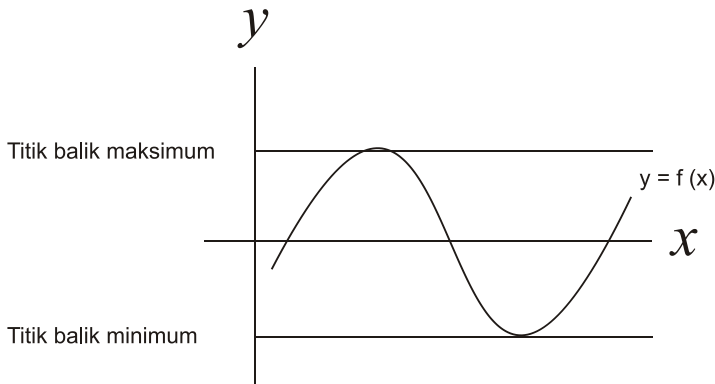
4. Posisi keempat adalah daerah hasil dari persamaan fungsi berupa garis lurus yang sejajar dengan sumbu  $x$ . Pada grafik ini nilai  $y=f(x)$  adalah konstan untuk semua nilai  $x$ , dengan kata lain nilai maksimal dan minimal tidak ada karena nilai maksimal dan nilai minimal dan nilai  $y=n_1$ , dengan bentuk grafiknya adalah garis lurus mendatar, posisi ini disebut  $H\}a>lat$  al-Mustaqim (posisi lurus tanpa ada alternatif) dengan gambar sebagai berikut :



5. Selanjutnya adalah persamaan fungsi yang daerah hasilnya berupa kurva terbuka dengan titik akhir yang cenderung mendekati sumbu  $y$  dan bertemu pada daerah tak terhingga. Demikian juga titik pangkalnya terletak pada daerah tak terhingga yang berhimpit dengan sumbu  $x$ , posisi ini disebut Halat al-Hadd al-'Ala bi khatt al-Maqarib lil mustaqim aiy yaqtariba wala yamasa (posisi batas maksimal cenderung mendekati tanpa ada persentuhan sama sekali kecuali di daerah tak terhingga):



6. Bentuk terakhir adalah persamaan fungsi yang daerah hasilnya berupa kurva gelombang dengan titik balik minimum yang berada di daerah negatif, yang keduanya berhimpit dengan garis lurus yang sejajar dengan sumbu x, posisi ini disebut dengan Halat al-Haddi al-'Ala Mujaban wa Haddu al-Adna Saliban (posisi batas maksimal positif dan batas minimal negatif). jika digambarkan berbentuk seperti berikut:



Keenam bentuk fungsi diatas, menurut Syahrur merupakan sifat yang menggambarkan fenomena alam<sup>14)</sup>. Bahwa titik maksimal dan titik minimal pada kurva atau pada garis lurus dari *range* (daerah hasil) yang berbentuk dari persamaan fungsi  $y=f(x)$  diatas, ternyata selalu terletak berhimpit dengan garis lurus sejajar dengan sumbu x. Titik balik maksimum menunjukkan batas maksimal yang bisa dicapai, demikian pula titik balik minimum merupakan batas minimal yang mungkin terjadi, keluar dari dua batas tersebut adalah penyimpangan dari *range* fungsi itu sebuah kesalahan.

Dari keenam variasi daerah hasil persamaan fungsi diatas, Syahrur mendasarkan teori batasnya. Menurut Syahrur persamaan fungsi ini dapat

---

<sup>14)</sup>*ibid* hlm. 451



mengantarkan kita pada pemahaman bahwa ajaran Islam mempunyai dua sisi yang sangat signifikan, yaitu *mustaqim* (yang tetap dan abadi) yang disimbolkan dengan garis lurus yang membatasi titik balik maksimal maupun titik balik minimal, kemudian sisi *h}anifiyah* (yang dinamis dan elastis) disimbolkan dengan bentuk garis lengkung baik pada kurva tertutup maupun kurva terbuka, yang mempunyai alternatif hasil diantara titik-titik baliknya. Sumbu *y* melambangkan arah perkembangan penetapan hukum Islam (evolusi syari'ah) sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan.

Sumbu *x* melambangkan arah perkembangan waktu, kondisi sosio kultural masyarakat dalam sejarah. Titik pangkal melambangkan permulaan diutusnya Muhammad sebagai Nabi dan Rasul yang dibekali dengan risalah dan nubuwah atau disebut dengan *hijrah nabawiyah* (*hijrah kenabian*), sedangkan *range* atau daerah hasil persamaan fungsi disimbolkan dengan kurva dan garis lurus dan pada wilayah *range* inilah manusia terbuka melakukan *ijtihad* untuk menetapkan hukum dan aturan-aturan sesuai dengan kemaslahatan. Namun khusus pada varian keempat, yaitu posisi lurus (*H}a>lat al-Mustaqim*) hanya memberikan satu hasil tanpa alternatif lain, karena batas maksimalnya identik dengan batas minimalnya. Posisi ini merupakan batas-batas ketentuan Allah (*hududullah*) yang tidak dapat berubah dan tidak boleh dilanggar, karenanya disebut pula sebagai sisi *mustaqim*.

#### **D. Aplikasi Teori Hudud**

Sesuai dengan varian-varian pada persamaan fungsi yang jumlahnya dapat disederhanakan menjadi enam bentuk, maka teori hudud demikian pula pembagiannya. Kalau diatas tadi telah disebutkan bentuk-bentuk variasinya, sekarang saatnya memakai variasi tersebut langsung dalam contoh kasusnya.

1. *Halat al-hadd al-Adna* (posisi batas minimal)<sup>15)</sup> yaitu suatu penetapan hukum boleh dilakukan jika berada diatas batas minimal yang telah ditentukan dalam al-Qur'an atau paling tidak berada pada garis batas yang ditetapkan, tapi tidak boleh melampauinya. Ayat hudud yang termasuk dalam kategori ini adalah ayat al-mah}arim (Q.S. an-Nisa : 22-23), ayat tentang jenis makanan yang dilarang (Q.S. al-Maidah : 3), ayat tentang pakaian wanita (Q.S. an-Nur : 31).
2. *Halat al-hadd al-A'la* (posisi batas maksimal)<sup>16)</sup> merupakan kebalikan dari pengertian nomor satu yaitu ayat-ayat hudud hanya mempunyai batas maksimal saja, sehingga dalam penetapan hukumnya harus berada dibawah batas maksimal atau tetap berada pada garis/batas maksimal

---

<sup>15)</sup>*Ibid.*, hlm. 453-455

<sup>16)</sup>*Ibid.*, hlm. 455-457

yang telah ditentukan Allah dalam al-Qur'an. Ayat-ayat yang menjelaskan posisi ini antara lain : ayat tentang hukuman bagi pembunuh (Q.S. al-Baqarah : 178, al-Isra' : 33), ayat tentang hukuman pencuri baik laki-laki maupun perempuan (Q.S. al-Maidah : 38).

3. *Halat al-Haddaini al-'Ala wa al-Adna Ma'an* (posisi batas maksimal dan minimal bersamaan)<sup>17)</sup>. Maksudnya pada sebagian ayat-ayat hudud terkadang ada yang mempunyai batas maksimal sekaligus batas minimalnya, sehingga dalam penetapan hukumnya dilakukan diantara kedua batas tersebut. Ayat-ayat yang termasuk dalam kategori posisi ini adalah ayat tentang poligami (Q.S. an-Nisa : 3), ayat tentang pembagian harta waris (Q.S. an-Nisa : 11-14).
4. *Halat al-Mustaqim* (posisi lurus)<sup>18)</sup>. Maksudnya pada ayat-ayat hudud ada ayat yang tidak mempunyai batas minimal maupun maksimal, sehingga tidak terdapat alternatif hasil dari penerapan hukumnya selain yang ditentukan saja. Misalnya termuat dalam Q.S. an-Nur : 2, tentang hukuman bagi pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan. Pada kasus seperti zina, al-Qur'an menetapkan hukuman bagi pelakunya yaitu dicambuk 100 kali. Menurut Syahrur, khususnya kasus zina tidak ada pilihan lain untuk penetapan hukumnya agar lebih ringan atau lebih berat dari yang telah termaktub dalam al-Qur'an tersebut. Sikap tegas ini menurut Syahrur ditandai dengan kata *ar-ra'fah* (rasa belas kasihan), sehingga memberi peringatan bahwa dalam melakukan hukuman tersebut seseorang tidak diperbolehkan menaruh rasa kasihan terhadap pelaku zina.
5. *Halat al-Hadd al-'Ala bikhat muqarib lil mustaqim*, yaitu posisi batas maksimal cenderung mendekat tanpa ada persentuhan sama sekali kecuali pada daerah yang tak terhingga. Posisi ini mengedepankan adanya fenomena hubungan laki-laki dan perempuan<sup>19)</sup>. Hubungan tersebut berawal dari hubungan biasa tanpa melibatkan hubungan fisik sampai dengan mendekati garis *mustaqim*, yaitu batas perzinahan. Garis *mustaqim* ini tidak memiliki batas minimal maupun maksimal dan hanya ditandai dengan satu titik garis lurus. Garis lurus tersebut ditetapkan oleh Allah sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan diluar nikah. Dari sini dipahami mengapa dalam al-Qur'an dipergunakan redaksi *wala taqrabu az-zina* dan *wala taqrabu al-fawahisy*, tidak lain sebagai sebuah peringatan bagi manusia bahwa tahap pendekatannya tersebut jika diteruskan akan menjermuskannya kedalam larangan Allah.
6. Posisi batas maksimal positif dan tidak diperbolehkan melampauinya:

حالة حد الأعلى موجب متحلق لا يجوز تجاوزه والحد الأدنى سالب يجوز تجاوزه

---

<sup>17)</sup>*Ibid.*, hlm. 457

<sup>18)</sup>*Ibid.*, hlm. 463

<sup>19)</sup> *Ibid.*, hlm. 464

Posisi ini terlihat pada konsep riba sebagai batas maksimal positif yang tidak boleh dilanggar dan zakat sebagai batas minimal negatif yang boleh dilanggar dicontohkan oleh Syahrur dengan shadaqah. Hal ini karena shadaqah memiliki dua batas yaitu batas maksimal pada daerah positif dan minimal pada daerah negatif. Posisi tersebut secara otomatis mempunyai batas tengah tepat berada diantara keduanya yang disimbolkan dengan titik nol pada persilangan kedua sumbu.

### **III. Konsep Poligami menurut Muhammad Syahrur**

Syahrur mengakui keabsahan poligami, sebagaimana yang ditegaskan dalam surat an-Nisa' ayat 3.<sup>20</sup> Dalam memandang ayat tersebut, Syahrur menilai bahwa itu termasuk ayat *hududiyah*, dan arti ayat tersebut merupakan ayat yang dapat mengandung batasan-batasan penetapan hukum, baik batasan hukum, baik dalam batasan penbetapan hukum kuantitatif (*hudud al-Kamm*) maupun bersifat batasan penetapan hukum kualitatif (*hudud al-Kayf*).

Dengan demikian dengan demikian ayat ini masuk dalam teori *al-had al-a'la* dan *al-had al-adna*. Bila dimasukkan dalam teori ini, maka secara kuantitatif poligami dapat dibenarkan apabila menikahi perempuan dengan batasan minimal 1 (satu) dan maksimal 4 (empat). Secara kualitatif, untuk isteri pertama tidak memandang apakah ia itu masih perawan ataukah sudah janda, namun untuk isteri kedua dan seterusnya harus dalam keadaan janda. Kedua batasan ini harus diperhatikan sekaligus dalam praktik poligami.<sup>21</sup>

Syarat tertentu dalam menikahi janda haruslah yang memiliki anak yatim, karena pada dasarnya, tuntutan berlaku adil menurut Syahrur, tidaklah semata pada isteri yang dinikahnya saja, akan tetapi diperuntukkan pula terhadap anak-anaknya dari isteri pertama dan anak-anak yatim yang ditanggungnya. Sehingga yang dimaksud bukanlah sekedar hak dan keluasan suami untuk beristeri lebih dari satu, akan tetapi yang lebih esensial adalah pemeliharaan anak yatim.

Tujuan Syahrur dalam menilai poligami merupakan alasan humanistik. Karena lebih terkait erat dengan pemahaman sosial kemasyarakatan. Orientasi legislasi poligami adalah untuk melindungi perempuan janda dan anak-anak yatim, jadi poligami bukanlah kepentingan biologis semata, melainkan lebih sebagai ekspresi perlindungan janda dan penyantunan anak-anak yatim.

Syahrur mengkritik para ulama dengan mengatakan bahwa, para ulama berfikir tentang poligami hanya berhenti pada *al-had al-adna*, dan

---

<sup>20</sup> Ayat yang berbunyi:

وان خفتم الا تقسطوا في اليتيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا

<sup>21</sup> Muhammad Syahrur, *loc. cit.*, hlm. 598.

berdasarkan pada penggalan:

وان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة .

Mereka mengatakan bahwa perkawinan adalah monogami dan hanya diperbolehkan kalau dalam keadaan darurat saja, misal isteri sakit, kelemahan fisik. Menurut Syahrur, pandangan ini tidak memuaskan, karena pada prinsipnya tidak ditemukan satu ayatpun yang melarang praktik poligami. Dan sebagian lagi dari para ulama membolehkan poligami, secara leluasa tanpa mempertimbangkan batas-batas kualitatif,<sup>22</sup> hingga dari pendapat ini tampak sekali bahwa poligami merupakan bentuk hegemoni kaum laki-laki atas kaum perempuan.

Dengan demikian poligami menurut Syahrur adalah:

1. Poligami merupakan problem kemanusiaan, yakni mengatasi persoalan ketimpangan sosial yang timbul oleh banyaknya janda dan anak-anak yatim yang telantar.
2. Poligami sebagai pemahaman sosial kemasyarakatan bukanlah sekedar untuk kepentingan biologis ataupun individual, akan tetapi lebih bisa memperbaiki harkat dan martabat bagi seorang perempuan.

Ayat-ayat hudud tidak boleh dipahami secara literal dan *taken for granted*, tetapi harus juga dipandang sebagai ayat-ayat yang mengisyaratkan "batasan-batasan minimum" dan "batasan-batasan maksimum" dalam penetapan hukum. Para mufassir dalam hal ini diperkenankan untuk melakukan ijtihad yang berada dalam lingkup batas-batas tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang pada saat mereka hidup.<sup>23</sup>

Menurut Syahrur, perhatian terhadap ketentuan boleh atau tidaknya praktik poligami menjadi sangat signifikan agar tidak keluar dari "spirit" teks al-Qur'an. Dalam hal ini Syahrur mencoba mengelaborasi logika al-Qur'an dengan memperhatikan struktur linguistik yang terdapat dalam suatu ayat. Pertama ia membahas dua kata kunci pada ayat tersebut. Dari segi etimologis, dua kata yang dimaksud adalah قسط (*qasatha*) dan عدالة (*'adalah*). Dalam bahasa Arab, kedua lafal tersebut masing-masing memiliki dua potensi makna yang paradoks. Syahrur tidak memandang bahwa kata قسط (*qasatha*) merupakan sinonim bagi kata عدالة (*'adalah*), keduanya memiliki perbedaan konotasi, dan arti keadilan dalam kata قسط (*qasatha*) dipandang dari satu arah atau tanpa adanya perbandingan sementara "berbuat adil". Yang dimaksud kata عدالة (*'adalah*) ialah bersikap adil antara dua pihak yang berbeda مسوى بين طرفين مختلفين (*musawa bain tharafain mukhtalifain*).<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Muhammad Syahrur, *loc. Cit*, hlm. 598-599

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 531.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 597-598

Dengan demikian, ungkapan:

وان خفتم الا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع

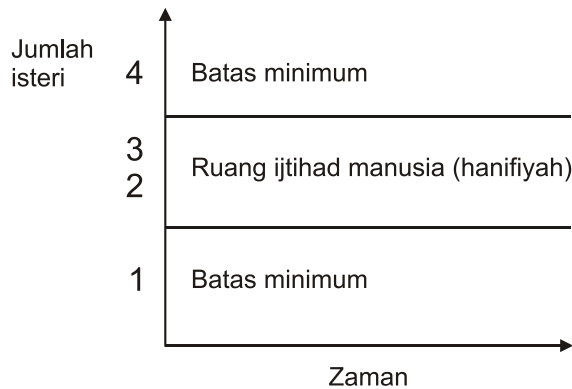
Menurut Syahrur harus dipahami "*Dan seandainya kalian kahawatir tidak dapat berbuat baik (tidak dapat memperhatikan) kepada anak-anak yatim, maka nikahilah ibu-ibu mereka (an-Nisa') yang kalian sukai dua, tiga, empat*". Dari sini Syahrur ingin menegaskan bahwa dari segi kualitatif, kebolehan poligami dikaitkan dengan persyaratan bahwa isteri kedua dan selanjutnya harus janda dan mempunyai anak yatim.

Dalam rangka menguatkan pendapatnya ini, ia kemudian menganalisis struktur gramatika bahasa ayat tersebut dengan mengaitkan penetapan praktik poligami pada:

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع  
Sebagai struktur جواب الشرط (*jawab al-syarth*) dengan ungkapan:

وان خفتم الا تقسطوا في اليتيمى  
Sebagai struktur شرط (*syarth* / atau dipahami kondisional).

Dalam جواب الشرط (*jawab al-syarth*) tersebut tidak disebutkan jumlah minimal yaitu satu orang wanita, malinkan langsung dimulai dengan kata مثنى (dua-dua). Maka dalam teori batas dalam kualifikasi kuantitatif dapat dilihat dari penjelasan diagram berikut:



Selanjutnya, landasan Syahrur tidak hanya pada surat an-Nisa' ayat 3 saja, Syahrur juga memakai مناسبة الايات (*munasabah al-ayat*), yaitu mencari kesesuaian dengan ayat-ayat lain yang mempunyai persinggungan langsung dengan ayat poligami. Ayat tersebut dapat dimunasabahkan dengan ayat 6 surat an-Nisa'. Maka bila dimunasabahkan, dapat dipahami bahwa tidak boleh sewenang-wenang terhadap anak-anak yatim, dengan demikian janda dan anak yatim berhak untuk mendapatkan hak pendidikan, ekonomi, sosial

dan sebagainya.

Maka dari sini, Syahrur memahami ayat *wainkhiftum alla tuqsiyhu....* Dan seterusnya adalah dengan arti : "*Maka jika seandainya kalian khawatir tidak dapat berbuat adil antara anak-anaknya dari isteri pertama dan anak-anak isteri kedua, anak satu orang wanita janda saja (agar beban ekonominya dan tanggung jawabnya tidak terlalu berat).*"

#### **IV. Penutup**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam merumuskan konsep poligami, dalam draft KHI berpijak pada maqashid al-Syar'i bukan pada teks yang ada. Dengan dalih di atas akhirnya menetapkan bahwa prinsip perkawinan Islam adalah monogami. Syahrur mengakui keabsahan poligami, sebagaimana yang ditegaskan dalam surat an-Nisa' ayat 3. Dalam memandang ayat tersebut, Syahrur menilai bahwa itu termasuk ayat *hududiyyah*, dan arti ayat tersebut merupakan ayat yang dapat mengandung batasan-batasan penetapan hukum, baik dalam batasan penetapan hukum kuantitatif (*hudud al-Kamm*) maupun bersifat batasan penetapan hukum kualitatif (*hudud al-Kayf*).
2. Dalam Metode draft KHI, hal yang menjadi sorotan utama dalam poligami adalah keadilan. Draft KHI berargumen bahwa karena ketidakmungkinan seseorang untuk dapat berlaku adil, akhirnya ketidakadilan tersebut mempunyai dampak negative, antara lain rusaknya sistem yang ada dan dampak negatif lainnya.<sup>25</sup> Muhammad Syahrur berpendapat bahwa ayat poligami masuk dalam teori *al-had al-a'la* dan *al-had al-adna*. Bila dimasukkan dalam teori ini, maka secara kuantitatif poligami dapat dibenarkan apabila menikahi perempuan dengan batasan minimal 1 (satu) dan maksimal 4 (empat). Secara kualitatif, untuk isteri pertama tidak memandang apakah ia itu masih perawan ataukah sudah janda, namun untuk isteri kedua dan seterusnya harus dalam keadaan janda. Kedua batasan ini harus diperhatikan secara sekaligus dalam praktik poligami.

---

<sup>25</sup> Lihat: Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam; Sebuah Dokumentasi*, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 161. Sayyid Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Mesir: Dar al-Manar, 1367 H), cet. III, hlm. 349.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abd al-Rahman, Fadzil Abd al-Wahid. 1996/1417, *Ushul Fiqh*, Amman: Dar al-Masirah
- Abdullah, Amin. 1996, "Arkoun Dan Kritik Nalar Islam", dalam *Tradisi Kemodernan dan Meta-Modernisme*, Yogyakarta : LKis
- al-Ghazali, Muhammad. 1993, *al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Ushul*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Hasyim, Syafiq 2001, *Hal-hal yang tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam; Sebuah Dokumentasi*, Bandung: Mizan
- Purcell, Edwin J. 1984, *Kalkulus dan Geometri Analitik*, terj Enyoman Susilo dan Bana Kartasasmita Rawuh, Jakarta : Erlangga
- Ridha, Sayyid Rasyid. 1367 H *Tafsir al-Manar*, cet. III, Mesir: Dar al-Manar
- Syahrur, Muhammad. 1990, *Al-Kitab wa Al-Qur'an Qira'ah Mu'ashirah*, Damaskus: Al-Mahalli li At-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi'
- Syamsuddin, Sahiron. 1998, "Review al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'as'irah dalam al-Jami'ah", *Journal of Islamic Studies*
- Al-Syatibiy, Abu Ishak, 1996, *al-Muwafaqaat*, Bairut: Dar al-Ma'rifah
- Tim Pangarusutamaan Gender DEPAG RI. 2004, *Pembaruan Hukum Islam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: t.p.